



Dugaan Korupsi Perdin Kota Denpasar

Hitung Kerugian Negara, Penyidik Surati BPKP

DENPASAR, NusaBali

Setelah memastikan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (Perdin) Kota Denpasar, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar langsung mengirimkan surat kepada BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) Wilayah Bali untuk melakukan audit dan menentukan nilai kerugian negara.

Kasi Intel Kejari Denpasar, Syahrir Sagir yang ditemui, Senin (3/8) sore mengatakan untuk penyelidikan kasus perdin Kota Denpasar sudah selesai meminta keterangan saksi. Saat ini, penyelidikan akan dilanjutkan dengan mengirimkan surat ke BPKP Wilayah Bali.

"Hari ini kami akan kirim surat ke BPKP Wilayah Bali," tegasnya. Dalam surat ini akan meminta BPKP melakukan audit terkait anggaran perjalanan dinas Pemkot Denpasar yang disinyalir ada penyimpangan. Audit ini juga nantinya akan menentukan berapa kerugian negara dalam kasus ini. "BPKP kami minta melakukan audit untuk menentukan kerugian negaranya," tegasnya.

Ia mengatakan sebelumnya, dalam koordinasi yang dilakukan dengan BPKP Wilayah Bali, pihaknya memastikan adanya perbuatan melawan hukum (PMH) dalam kasus ini. Sementara terkait calon tersangka dalam kasus ini, Syahrir memilih tidak berkomentar. "Nanti setelah gelar dan naik penyidikan akan diumumkan oleh Pidsus (Pidana Khusus)," bebernya.

Selain mengirimkan surat untuk melakukan audit kasus perdin, dalam waktu bersamaan penyidik juga meminta BPKP melakukan audit dan perhitungan negara dalam kasus dugaan korupsi PD Parkir. "Suratnya akan kami kirimkan bersamaan," beber Syahrir yang ditemui di Kejari Denpasar. rez

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2015

Hal : 5



Perbekel Ketar-katir Dana Desa Cair,

Masalahnya, belum ada pengaturan kebutuhan secara detail terkait bisa tidaknya dana itu untuk membiayai kegiatan.

GIANYAR, NusaBali

Pemerintah pusat telah mencairkan tahap I (pertama) atau 40 persen dari total dana desa Rp 19.166.561.000 untuk 64 desa di Gianyar, Juni - Juli 2015. Namun, rata-rata para perbekel belum lugas, bahkan ketar-ketir menggunakan dana ini untuk kegiatan di desa.

"Banyak perkebel masih dibayangi tuduhan 'pemakaian

dana desa yang ternyata salah pakai' dari pihak lain, dan berdampak jeratan hukum," ujar Ketua Forum Komunikasi Perbekel/Lurah Kabupaten Gianyar I Gusti Nyoman Gede Susila di Gianyar, Selasa (4/8).

Susila yang Perbekel Desa Bona, Kecamatan Blahbatuh ini menegaskan, keraguan bahkan ketakutan perbekel itu tiada lain karena ada banyak peraturan yakni UU, PP (peraturan pemerintah) sampai Perda yang melandasi penggunaan dana ini. Masalahnya, sejumlah aturan itu belum ada yang mengatur kebutuhan secara detail terkait bisa tidaknya dana itu untuk membiayai kegiatan atau pengadaan barang. Misalnya, kata dia, apakah dana ini bisa untuk merehab kantor desa. Kerusakan kantor seperti apa hingga kantor

ini bisa diperbaiki dengan dana ini. "Tingkat kerusakan kantor desa seperti di Batubulan, Sukawati atau di desa-desa yang berpendapatan tinggi, belum tentu dianggap rusak dan layak direhab untuk kantor desa di wilayah Payangan, dan lainnya. Indikator rusaknya hingga layak rehab harus jelas. Jika tidak jelas, akan bisa jadi laporan dan temuan," tegasnya.

Kepala Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Gianyar I Ketut Suastika SSos mengakui, dana desa tahap I dari pusat telah turun ke masing-masing desa, Juni - Juli 2015. Pencairan dana ini dari pusat tahap II dan III tak akan lewat 2015 nanti. Dana desa dari pusat untuk 2015 ini terkecil diraih Desa Pejeng Klod, Kecamatan Tampaksiring Rp 284.742.143 dan terbesar

Rp 338.172.127 di Desa Lodunduh, Ubud. Alokasi dana ini sesuai proporsi rumusan dengan menghitung jumlah penduduk, topografi desa, dan tingkat kemiskinan. Pencairan dana ini masing-masing 40 persen tahap I dan II, dan tahap III 20 persen. "Dana desa Rp 1 miliar per desa seperti yang dijanjikan Pusat, memang belum bisa terealisasi tahun ini. Mulai 2016 ke depan, Pusat akan menaikkan dana desa sampai berjumlah Rp 1 miliar per desa tiap tahun," ujarnya.

Dana Pusat didampingi dengan alokasi dana APBD Gianyar 2015 atau ADD (alokasi dana desa) Rp 7.216.604.200. Sesuai proporsinya, dana ini terkecil sekitar Rp 108.500.000 didapatkan Desa Bresela, Kecamatan Payangan, Desa Belega, Kecamatan Blah-

batuh, Desa Suwat, Kecamatan Gianyar, dan Desa Pejeng Kawan, Kecamatan Tampaksiring. Sedangkan jumlah terbesar diatas Rp 119 juta per desa diraih Desa Kemenuh dan Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Desa Keramas, Kecamatan Blahbatuh, dan Desa Singakerta, Kecamatan Ubud.

Suastika mengatakan, para perbekel tak perlu takut menggunakan dana desa, sepanjang sesuai dengan peruntukan kegiatan yang diajukan. Karena proposal kegiatan menjadi landasan utama penggunaan dana tersebut. "Setiap desa juga ada pendamping yang akan memberikan arahan penggunaan dana desa sesuai UU Desa. Pendamping ini segera akan direkrut oleh Pemprov Bali," jelasnya. **isa**



Sidang Dugaan Korupsi PIPANISASI Karangasem Eks Kadis PU Dicecar Soal Pemenang Lelang

DENPASAR, NusaBali

Eks Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Karangasem, I Nyoman Arnawa dihadirkan untuk bersaksi dalam sidang dugaan korupsi pipanisasi Karangasem dengan terdakwa eks Kepala PT Adhi Karya Divisi VII, Imam Wijaya Santosa di Pengadilan Tipikor Denpasar pada, Selasa (4/8). Dalam keterangannya, saksi yang juga terpidana kasus yang sama menyatakan gugurnya PT Waskita Karya dalam tender proyek dan penunjukan PT Adhi Karya sebagai pemenang lelang sudah sesuai aturan.

Hal ini ditegaskan Arnawa saat bersaksi di hadapan majelis hakim Gede Hariyadi yang memimpin sidang. Awalnya, majelis hakim menanyakan soal gugurnya PT Waskita Karya sebagai pemenang lelang yang akhirnya digantikan oleh PT Adhi Karya dalam lelang proyek tahun 2009.

Arnawa menyatakan jika gugurnya PT Waskita Karya sudah sesuai dengan PP 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. "Penentuan gugurnya PT Waskita Karya sebagai pemenang sudah sesuai aturan," jelasnya. Selain itu, Arnawa menyebut alasan lainnya dalam gugurnya PT Waskita Karya yang merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ini.

Ia mengatakan sempat membaca salah satu media massa yang menyatakan jika ada dua Direktur

Utama di PT Waskita Karya yang diberhentikan karena melakukan penggelapan dan pemalsuan dokumen hingga merugikan perusahaan Rp 500 miliar. "Ini disampaikan langsung oleh Sekertaris BUMN waktu itu," tegasnya.

Hakim anggota, Achmad Peten Sili lalu mengejar Arnawa terkait keputusannya menggugurkan PT Waskita Karya sebagai pemenang lelang yang disebut terlalu subjektif. Malah Peten Sili berkelakar tidak akan menggunakan Arnawa sebagai Kadis PU jika menjadi Bupati. "Kalau saya Bupati saya tidak akan pakai kamu. Apalagi 'koran' yang kamu percaya," ujar Peten Sili.

Selain itu, Arnawa juga sempat menjelaskan soal penunjukan langsung PT Adhi Karya dalam pengerjaan proyek lanjutan di tahun 2010 yang menganggarkan dana Rp 3 miliar lebih. Arnawa mengatakan penunjukan langsung tersebut didasarkan atas pengerjaan proyek sebelumnya di tahun 2009 yang sudah diselesaikan PT Adhi Karya 85 persen. Untuk menghindari kegagalan proyek tersebut, maka



• NUSABALI/YUDA

MANTAN Kadis PU Karangasem, Wayan Arnawa duduk sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi pipanisasi Karangasem dengan terdakwa Imam Wijaya Santoso (kanan) di Pengadilan Tipikor Denpasar, Selasa (4/8).

pihaknya menunjuk PT Adhi Karya untuk kembali mengerjakan proyek lanjutan di 2009 yang menganggarkan Rp 29 miliar. "Memang ada penunjukan langsung. Tapi itu sudah sesuai aturan dan konsultasi dengan BPKP," tegasnya.

Dalam sidang juga sempat ditunjukkan pipa galanis yang menjadi akar masalah dalam proyek pipanisasi karena tidak sesuai dengan kontrak. Namun Arnawa yang ditunjukkan mengaku tidak tahu soal pipa tersebut karena merupakan tugas konsultan pengawas. "Itu tugas konsultan pengawas. Saya tidak tahu," ujarnya. Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. rez

Edisi : Rabu, 5 Agustus 2010

Hal : 5